



BAB 4

ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambaran umum kondisi Jawa Timur pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dapat dirangkumkan dalam tabulasi per urusan sebagaimana tertera pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Inventarisasi Permasalahan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Urusan

| No | Urusan/Permasalahan |
|-----------|--|
| | URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| 1. | Pendidikan |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;2. Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum;3. Masih terbatasnya layanan pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Jawa Timur;4. Belum meratanya penyebaran guru antara kota dan desa;5. Kurangnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan; |
| 2. | Kesehatan |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (Kusta, HIV dan AIDS, TBC)2. Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi3. Masih rendahnya pemerataan kualitas pelayanan kesehatan.4. Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia dibidang kesehatan5. Belum tercapainya universal coverage jaminan kesehatan6. Masih tingginya angka stunting |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya tingkat layanan Prasarana Sumber Daya Air2. Meningkatnya lahan Kritis pada Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga menyebabkan turunnya daya dukung area resapan air, tingginya surface run off dan tinggi3. Belum terpenuhinya standar teknis lebar Jalan Provinsi4. Belum optimalnya daya dukung dan kapasitas jalan Provinsi untuk |

| No | Urusan/Permasalahan |
|-----------|---|
| | <p>mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kurangnya rencana rinci tata ruang (kawasan strategis provinsi) 6. Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang 7. Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan di daerah 8. Rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang |
| 4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Backlog rumah yang masih tinggi 2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau, 3. Menurunnya kualitas permukiman yang berdampak pada tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan, 4. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman perdesaan 5. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, daerah rawan air dan lintas Kabupaten/Kota 6. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan 7. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) 8. Belum adanya infrastruktur sampah regional |
| 5. | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Maraknya demonstrasi dalam berbagai kepentingan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum 3. Kecilnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Kecilnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk 5. Turunnya Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan 6. Tingginya Angka kriminalitas 7. Unjuk rasa masyarakat (demo) yang cenderung meningkat |
| 6. | Sosial |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS 2. Tingginya angka penyalagunaan narkoba 3. Masih rendahnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan gangguan jiwa 5. Belum optimalnya penanganan korban pasung |



| No | Urusan/Permasalahan |
|------------|---|
| | 6. Belum optimalnya verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan masyarakat miskin di daerah |
| | URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| 7. | Tenaga Kerja |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja2. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja3. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal4. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian terhadap masuknya tenaga kerja asing |
| 10. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;2. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender3. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak;4. Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan;5. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang. |
| 8. | Pangan |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/kapita/tahun),2. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79).3. Inflasi bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrem).4. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan serius5. Rendahnya ketersediaan pangan |
| 9. | Pertanahan |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) bidang pertanahan2. Lemahnya administrasi pertanahan dalam menunjang pengendalian pemanfaatan lahan sesuai tata ruang |
| 10. | Lingkungan Hidup |

| No | Urusan/Permasalahan |
|------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. 2. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. 3. Menurunnya jumlah dan debit mata air. 4. Masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana prasarana persampahan 5. Terindikasi tingginya degradasi lingkungan, yang berpotensi memicu bencana alam |
| 11. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP 2. Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk 3. Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
| 12. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan desa. 2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 3. Belum Optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. 4. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan ekonomi desa (Bumdes, LKMK, LPMD, dll) 5. Kurang Optimalnya Kerjasama Desa Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan |
| 13. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya minat akseptor metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 2. Tingginya laju pertumbuhan penduduk |
| 14. | Perhubungan |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan massal yang murah dan nyaman, terutama masyarakat perkotaan; 2. Rendahnya aksesibilitas pelayanan infrastruktur di wilayah kepulauan; 3. Belum memadainya infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan sistem logistik; 4. Tingginya tingkat kecelakaan di perlintasan sebidang rel kereta api. 5. Belum optimalnya penyiapan infrastruktur perhubungan dengan skema |



| No | Urusan/Permasalahan |
|------------|--|
| | pembiayaan non APBD |
| 15. | Komunikasi dan Informatika |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Masih Terjadinya Kesenjangan Di Bidang Komunikasi Sosial Dan Teknologi Informasi (Digital Divide) Dimasyarakat Khususnya Antara Desa Dan Kota2. Belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik4. Masih terbatasnya Sarana dan prasarana Monitoring Isi Siaran di Media Televisi dan Radio. |
| 16. | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dan memiliki aset dan akses ke pembiayaan serta produktivitas yang terbatas. (95,72% Usaha Mikro 6.533.694 unit dari 6.825.931 unit sensus UMKM 2012)2. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan. Kredit UMKM hanya 29,6% total kredit.3. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas).4. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud;5. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen6. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (2 inkubator bisnis);7. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM (3.856 koperasi tidak aktif); |
| 17. | Penanaman Modal |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi,2. Kurang memadainya kapasitas SDM dan infrastruktur penunjang investasi3. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi |
| 18. | Kepemudaan dan Olah Raga |

| No | Urusan/Permasalahan |
|------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas pemuda 2. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. 4. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (PPLP dan PPLPD) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi 5. Masih rendahnya kualitas atlit |
| 19. | Statistik |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data dan statistik di lingkup pemerintah provinsi 2. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data 3. Belum tersedianya data yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pembangunan |
| 20. | Persandian |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengamanan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 2. Teknologi persandian yang relatif kurang mampu mengikuti perkembangan jaman. |
| 21. | Kebudayaan |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat 2. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah 3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan asset budaya |
| 22. | Perpustakaan |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan 3. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan |
| 23. | Kearsipan |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penataan tertib arsip; 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan; |
| | PILIHAN |
| 24. | Kelautan dan Perikanan |



| No | Urusan/Permasalahan |
|------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran;2. Menurunnya potensi ikan lemuru di perairan selat Bali;3. Keterbatasan bahan baku perikanan untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan4. Tingginya tingkat abrasi pantai;5. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;6. Mutu dan hasil tangkapan masih rendah;7. Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal;8. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah,9. Harga pakan ikan pabrikan tinggi;10. Rendahnya kualitas garam rakyat11. Masih maraknya kegiatan ilegal unreported dan unregulated fishing;12. Kualitas SDM non aparatur (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan. |
| 25. | Pariwisata |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya sinergi dengan stakeholder terkait2. Lemahnya pemasaran kedalam maupun luar negeri3. Kurangnya kualitas dari kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata4. Lemahnya pengelolaan dan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi |
| 26. | Pertanian |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan lahan pertanian relatif sempit (0,39 Ha),2. Rendahnya bahan organik tanah, masih terjadinya alih fungsi lahan. ,3. Fluktuasi Perubahan iklim yang mengakibatkan gangguan produksi,4. Belum optimalnya infrastruktur pertanian,5. Masih terjadi kehilangan hasil pertanian6. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah.7. Masih adanya pemotongan sapi betina produktif.8. Terbatasnya RPH modern yang berstandar SNI,9. Terbatasnya Petugas Lapangan Pertanian,10. Kelembagaan petani yang masih berdasarkan alamat (<i>by addres</i>).11. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan12. Belum optimalnya Perlindungan usahatani (asuransi pertanian baru tahap pilot project).13. Masih terjadi mutasi lahan ke non pertanian yang cukup tinggi. |

| No | Urusan/Permasalahan |
|------------|--|
| | 14. Masih tingginya harga pakan ternak |
| 27. | Kehutanan |
| | 1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan 2. Rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar hutan; 3. Belum berkembangnya hutan rakyat, 4. Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan; 5. Belum optimalnya penanganan konservasi hutan dan lahan. |
| 28. | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | 1. Keterbatasan potensi dan pasokan/ suplai energi 2. Masih belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) 3. Masih adanya kegiatan penambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan. |
| 29. | Perdagangan |
| | 1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri, 2. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G) 3. Masih terjadi Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli. 4. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan. |
| 30. | Perindustrian |
| | 1. Masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor 2. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk 3. Hambatan peningkatan efisiensi produksi, 4. Efisiensi biaya transaksi relatif masih rendah |
| 31. | Transmigrasi |
| | 1. Kurangnya Minat masyarakat untuk bertransmigrasi 2. Kurangnya kesiapan daerah tujuan penempatan transmigran |
| | FUNGSI PENUNJANG |
| 32. | Perencanaan Pembangunan |
| | 1. Belum sinkron dan tersedianya data 2. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan |



| No | Urusan/Permasalahan |
|------------|--|
| | terkait dengan perencanaan pembangunan |
| 33. | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik3. Belum optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.4. Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban5. Aktivitas Ormas/LSM belum semua melaporkan6. Kurang berdayanya institusi-institusi demokrasi, peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.7. Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM |
| 34. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Belum sinkronnya Pengumpulan data agregasi pada LPPD Kab/Kota dengan data SKPD Provinsi Jatim dlm pelaksanaan urusan wajib dan pilihan2. Banyaknya kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/tipikor) di Kab/Kota yang penjatuhan hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.3. Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan4. Banyaknya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik5. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik6. Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara7. Kurangnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah8. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu9. Rendahnya prosentase Kab/ Kota yang telah menyusun database inventarisasi asset hasil P3D secara lengkap dan akurat10. Belum optimalnya implementasikan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah |



| No | Urusan/Permasalahan |
|----|---|
| | 11. Masih banyaknya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 12. Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokoler. 13. Terbatasnya media yang dapat mempublish informasi melalui press rilis 14. Kompleksibilitas pelayanan kunjungan tamu VVIP yang cenderung meningkat. 15. Belum berkembangnya budaya IPTEK di masyarakat 16. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil |

4.2 Isu – Isu Strategis

Berdasarkan uraian dinamika pembangunan yang telah dijelaskan pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Jawa Timur ke depan.

4.2.1 Isu Internasional

4.2.1.1 Gejolak Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global hingga permulaan Tahun 2014 masih diwarnai dengan ekses gejolak krisis global yang diawali dari Krisis Utang Yunani yang mengimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia. Krisis ekonomi global tersebut memunculkan isu strategis internasional yang antara lain meliputi :

- Pertama adalah ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global. Perkembangan hingga akhir tahun 2013 menunjukkan pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai harapan, bahkan melambat. Situasi menjadi tidak pasti karena bergesernya lanskap ekonomi global.
- Isu kedua, terkait ketidakpastian yang meluas seiring ketidaktegasan kebijakan di Amerika Serikat, baik terkait penarikan stimulus kebijakan moneter maupun penyelesaian batas anggaran dan penghentian belanja pemerintah. Situasi yang

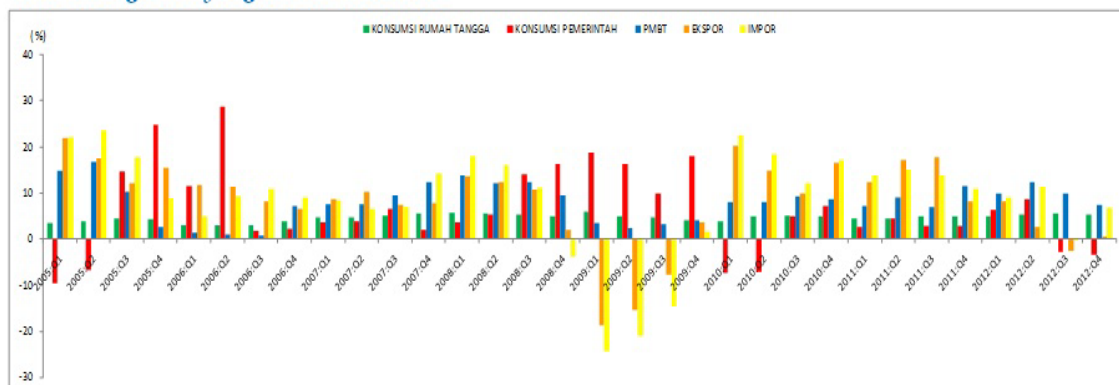


berlarut ini memicu penilaian ulang risiko oleh investor dan menimbulkan reaksi berlebih, akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk RI.

- Ketiga adalah berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan harga komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan global yang bergejolak, harga komoditas masih melanjutkan tren penurunannya sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas.

Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu/tidak pasti, nampaknya Pemerintah Indonesia masih akan mengandalkan konsumsi dalam negeri dan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya di tahun 2013 ini karena kontribusi ekspor belum bisa diharapkan akibat permintaan global yang sedang menurun.

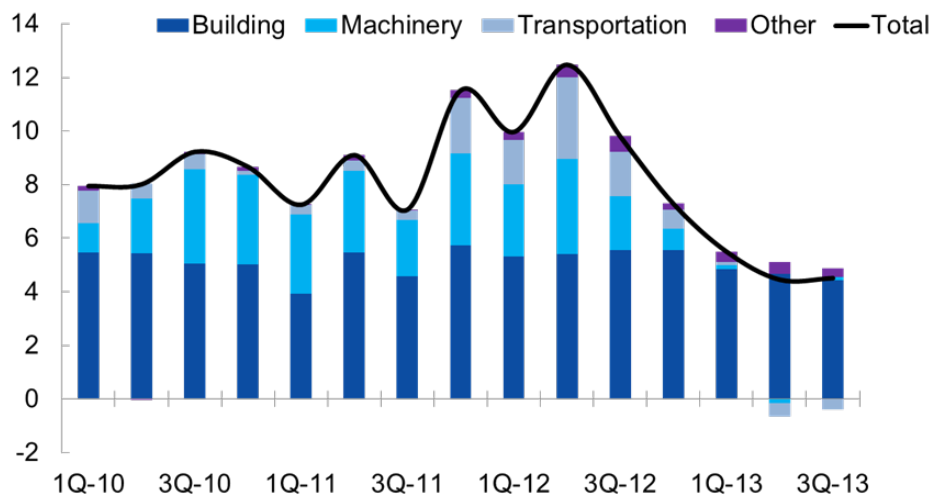
Kinerja neraca perdagangan belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kondisi ekonomi global yang belum membaik



Sumber: BPS dan CEIC

Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Atas dasar Harga Konstan 2000 Menurut Pengeluaran, Tahun 2005-2012 (YoY, dan dalam %)

Berkembangnya ketiga isu global tersebut tentu tak terhindar akan menurunkan kinerja ekonomi Nasional Indonesia. Di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan juga akan mengalami tekanan. Terkait pengurangan stimulus fiskal (*tapering off quantitative easing*) oleh The Fed juga berpengaruh ke seluruh dunia. Hal ini akan membuat ekonomi nasional ditandai derasny aliran modal asing yang keluar dan membuat nilai tukar rupiah tertekan tajam, seperti kecenderungan Gambar 4.2.



Pertumbuhan investasi tetap riil, tahun-ke-tahun, persen

Gambar 4.2 Trend Perlambatan Investasi tahun 2010 - Tw. III 2013

Sumber : Bank Dunia

Di tengah ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017, terdapat beberapa faktor risiko yang menambah ketidakpastian kondisi perekonomian terkini sehingga berpotensi menahan laju perbaikan, yaitu :

a. Kebijakan pemerintah baru AS

Kebijakan Presiden AS terpilih akan fokus pada upaya mendorong ekonomi domestik serta menerapkan proteksionisme

b. Kenaikan FFR

Laju normalisasi kebijakan moneter AS diperkirakan lebih cepat; The Fed diperkirakan akan menaikkan FFR sebanyak 3 kali pada tahun 2017

c. Brexit dan populisme di Eropa

Hasil referendum Inggris menambah ketidakpastian masa depan ekonomi EU; gerakan populisme cenderung menguat di Eropa

d. Data inflasi dan ketenagakerjaan AS menunjukkan perkembangan positif pada 2016.

e. Sesuai ekspektasi, FOMC Meeting Desember 2016 memutuskan kenaikan FFR sebesar 25 bps. The Fed diprediksi akan menaikkan FFR sebanyak 3 kali di tahun 2017.



- f. Di satu sisi, ekspektasi perbaikan ekonomi AS akan mendorong pertumbuhan global. Di sisi lain, laju normalisasi kebijakan moneter yang relatif cepat berpotensi mendorong *outflow* dari EM ke AS dan *safe haven countries*.

4.2.1.2 Lingkungan Hidup

Isu Internasional lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim.

Untuk membatasi peningkatan suhu global perlu dilakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

4.2.1.3 Millenium Development Goals (MDG's)

Isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau *Millenium Development Goal's* (MDG's) yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, sekitar 800 juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan, ketidakpedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar belakang dicetuskannya MDG's.

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDG's 2015 atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin



mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusun 17 Tujuan Global berikut 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Tanpa Kelaparan; 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesetaraan Gender; 6) Air Bersih dan Sanitasi; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 10) Mengurangi Kesenjangan; 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas; 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab; 13) Aksi Terhadap Iklim; 14) Kehidupan Bawah Laut; 15) Kehidupan di Darat; 16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dari 17 Tujuan tersebut terdiri dari 169 target dan 241 indikator yang pelaksanaannya dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan.

Dalam rangka mencapai keberhasilan SDGS yang ditargetkan sampai tahun 2030, ada tiga prinsip pelaksanaan SDGs yaitu :

1. *Universality*, yaitu SDGs dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang
2. *Integration*, yaitu SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan
3. *No one Left Behind*, yaitu harus memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan, dan pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Meski demikian komitmen pelaksanaan SDG's ini hingga tahun 2016 belum diatur/ditetapkan dalam ranah aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

4.2.1.4 Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.



Situasi produksi pangan di dunia diperkirakan relatif membaik tahun 2014. Total produksi cerealia di dunia akan meningkat 8,4% di periode 2013/2014 dibanding 2012/2013. Peningkatan terjadi 2, 6% di negara berkembang dan 17,4% di negara maju (*FAO Crop Prospects and Food Situation*, Desember 2013). Stok cerealia di dunia pada akhir musim 2014 diperkirakan meningkat 13,4% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, harga cerealia dunia terutama gandum, beras dan jagung akan menurun di tahun 2014. Harga kedelai internasional serta minyak nabati akan menurun juga (*FAO Food Price Index*, 9/1/2014).

4.2.1.5 Energi

Isu internasional energy dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energy dan pengembangan energy baru terbarukan, pertambangan ilegal dan pertambangan berkelanjutan.

Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga mengagendakan isu energi dan ketahanan pangan disamping isu-isu perekonomian.

4.2.1.6 Air

Isu internasional terkait dengan Air diantaranya adalah:

- a) Pencapaian target MDG's 2015 untuk sektor Air Minum dan Sanitasi di perkotaan dan pedesaan.



- b) Sesuai dengan tujuan pembangunan millenium (MDG's) bahwa Program Pengelolaan Sumber Daya Air harus mendukung untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem serta untuk memastikan kelestarian lingkungan

Penetapan agenda baru dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang merupakan akselerasi setelah tahun 2015 (MDGs) dengan isu yang terkait air diantaranya adalah:

- a) Meningkatnya polusi, maraknya dumping dan pelepasan bahan kimia berbahaya serta material lainnya yang mengakibatkan penurunan kualitas air. Dimana kualitas air akan berpengaruh pada masalah kesehatan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan tantangan lingkungan. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk mengurangi polusi terhadap air tawar melalui penampungan dan pengolahan air limbah.
- b) Efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin pemanfaatan serta pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air yang berkelanjutan. Pengambilan air yang berlebihan menyebabkan permasalahan terhadap sumber daya air terhadap manusia dan ekosistem, yang mengakibatkan biaya lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi pengambilan air secara berlebihan guna menjamin keberlanjutan sumber daya air, perlu untuk mengadopsi beberapa teknik penghematan pemanfaatan air di semua sektor, seperti: pertanian (misalnya irigasi tetes/ *dripirrigation*) dan industri (misalnya teknik penggunaan kembali air limbah).
- c) Perlindungan dan pemulihan terhadap ekosistem yang berhubungan dengan sumber daya air.

Ekosistem seperti lahan basah, hutan, sungai dan danau merupakan ekosistem yang sangat penting dalam kaitannya dengan menjaga kualitas dan kuantitas air. Apabila ekosistem tersebut menjadi rusak, maka akan kehilangan ketahanan yang dapat berakibat pada penurunan kualitas dan ketersediaan air. Perlu adanya perlindungan dan pemulihan terhadap ekosistem akibat adanya aktivitas manusia, misalnya urbanisasi, praktek-praktek pertanian yang tidak tepat serta polusi).



4.2.1.7 Transportasi

Tantangan global transportasi adalah keterkaitan antara pembangunan infrastruktur transportasi dengan lingkungan. Di berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan tidak selalu menjadi solusi yang terbaik. Sedangkan tantangan lainnya meliputi :

- a) Pembangunan infrastruktur transportasi menimbulkan dampak lingkungan akibat keberadaan dan pengoperasian infrastruktur transportasi, sementara wilayah memiliki batas kapasitas lingkungan tertentu untuk menerima dampak yang muncul.
- b) Faktor-faktor yang terkait dengan pengoperasian moda-moda transportasi bersifat sangat dinamis karena tingkat gangguannya tergantung dari volume penggunaan, jenis moda, dan teknologi yang digunakan. Dampak lingkungan yang dirasakan akibat pengoperasian transportasi ini yang umumnya menjadi isu-isu yang berkepanjangan karena terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas manusia.

4.2.2 Isu Regional

4.2.2.1 Daya Saing Nasional dalam AEC

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Tabel 4.2 Lingkup AEC 2015

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) | Pasar Tunggal dan Basis Produksi | Aliran bebas barang |
| | | Aliran bebas jasa |
| | | Aliran bebas investasi |
| | | Aliran bebas modal |
| | | Aliran bebas tenaga kerja terlatih |
| | Kawasan Ekonomi yang kompetitif | Kebijakan kompetisi |
| | | Proteksi konsumen |
| | | Hak kekayaan intelektual (HAKI) |
| | | Pembangunan infrastruktur |
| | | Perpajakan |
| | | <i>E – commerce</i> |
| | Pembangunan ekonomi yang merata | Pembangunan UMKM |
| | | <i>Initiative for Asean Integration (IAI)</i> |
| | | "Mengurangi gap pembangunan internal ASEAN" |
| | Integrasi dengan Perekonomian Global | Pendekatan koheren dalam hubungan ekonomi eksternal |
| | | "Negosiasi FTA dan CEP dengan pihak non-Asean" |
| | | Meningkatkan partisipasi dalam global supply network |



**KESIAPAN
DAYA
SAING
REGIONAL**

Di era perekonomian Global yang makin kompetitif, membutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti AEC tersebut. Sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (preference) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat Internasional hingga lokal.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan



dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non–tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain–lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

Setelah diberlakukannya AEC selama hampir setahun, belum nampak dampak secara signifikan terhadap perdagangan dan perekonomian Indonesia khususnya provinsi Jawa Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesiapan hampir semua negara ASEAN dalam menyongsong dan masuk dalam era AEC relatif hampir sama, yakni masih memerlukan berbagai konsolidasi internal. Dari data perkembangan perdagangan di semester pertama 2016 memang ada sedikit indikasi bahwa perdagangan produk non-migas Jawa Timur meningkat terutama produk perhiasan. Fenomena ini menjadi menarik karena pasarnya sangat dinamis dan dalam waktu yang singkat bisa berubah secara dramatis. Enam bulan lalu pasarnya didominasi 5 negara yakni Swiss, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Singapore, namun setelah enam bulan berselang pasarnya berubah didominasi hanya oleh Swiss dan US. Oleh karena itu untuk produk perhiasan ini harus selalu diikuti perkembangan pasarnya terus menerus. Berdasarkan perkembangan terkini dimaksud perlu dicermati kembali orientasi perdagangan Jawa Timur dalam kaitannya dengan AEC.

4.2.2.2 Transportasi

Beberapa isu strategis Konektivitas antara Indonesia dengan ASEAN, pembangunan system jaringan jalan yaitu ASEAN Highway Network, pembangunan jalur kereta api Kunming ke Singapura, pembangunan transportasi kelautan, pembangunan system transportasi antarmoda untuk mengembangkan pusat transportasi ASEAN di ASIA Timur, mempercepat pengembangan infrastruktur Informasi dan teknologi komunikasi dan layanan-layanannya di setiap Negara di ASEAN serta mengupayakan ketahanan energy pada proyek-proyek infrastruktur.



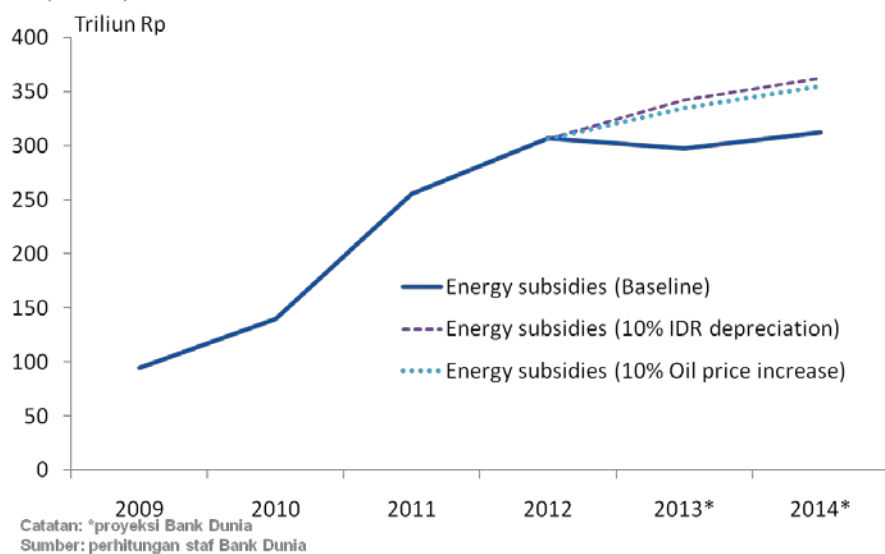
4.2.3 Isu Nasional

4.2.3.1 Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditi

Tiga isu strategis yang mewarnai perekonomian nasional Indonesia terakhir ini antara lain :

- Pertama terkait beban subsidi yang mempengaruhi ketahanan fiskal pemerintah. Jumlah subsidi akan terus membesar jika tidak ada upaya untuk menguranginya. Beban subsidi ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi ke depan.

Biaya subsidi energi – dasar (*baseline*) dan dengan depresiasi Rupiah/peningkatan harga minyak 10 persen



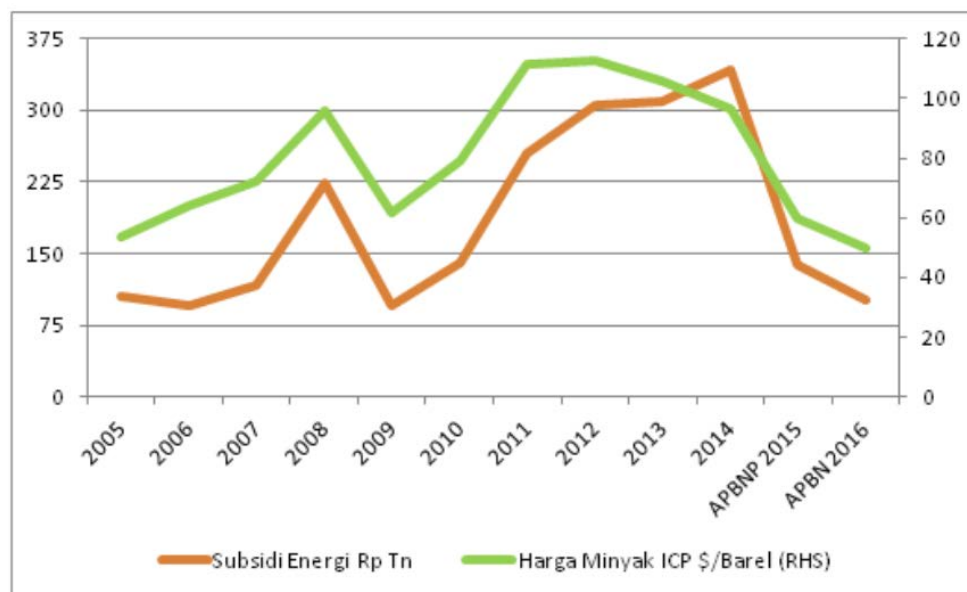
Gambar 4.3 Tingkat Subsidi Energi Tahun 2009-2014

- Isu kedua adalah terkait dengan fluktuasi harga beberapa komoditas pangan seperti daging dan bawang putih yang harus disikapi dengan kebijakan yang tepat guna mewujudkan stabilitas harga.
- Kontraksi perekonomian global yang berakibat pada defisit neraca transaksi berjalan (*current account*).
- Kontraksi terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar AS yang mengakibatkan kemungkinan berbagai dampak diantaranya cadangan devisa.

Prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) tentang bakal ambrolnya harga minyak mentah sebesar \$ 5-15 per barel di tahun 2016, mengagetkan banyak kalangan. Dan ternyata prediksi tersebut menjadi kenyataan, terutama pada Semester I – 2016 harga minyak mentah dunia memang merosot hingga mencapai titik terendah (limit) pada tingkat keekonomian produksinya.



Sebelum Presiden Joko Widodo mereformasi anggaran subsidi BBM, merosotnya harga minyak memang membawa berkah bagi Indonesia. Karena, sepanjang tahun 2012-2014 pemerintah harus menanggung beban subsidi hingga Rp 300 triliun per tahun, karena harga minyak rata-rata berada di atas level \$ 100 per barel.



Sumber: Kemenkeu, ESDM, diolah BAREKSA

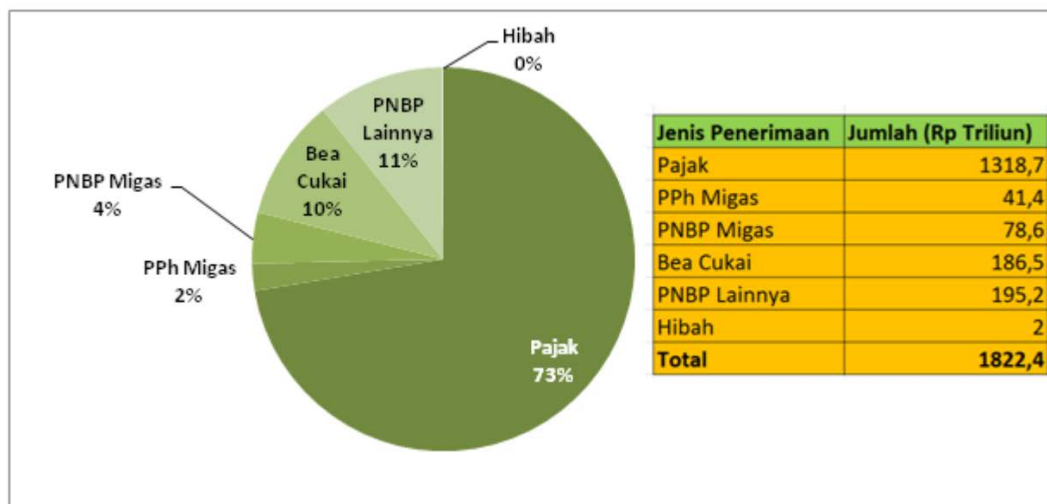
Gambar 4.4 Subsidi Energi dan Rata – Rata Harga Minyak ICP

Namun, dalam APBN 2016 anggaran untuk subsidi BBM tinggal "hanya" Rp 63,7 triliun yang terdiri dari dana subsidi LPG tabung 3 kg, minyak tanah, dan solar. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan ambrolnya harga minyak dunia ternyata tidak terlalu berpengaruh di sisi pengeluaran. Sebaliknya, dampaknya justru terasa di sisi pendapatan. Target APBN 2016 untuk perolehan penerimaan dari sektor minyak dan gas dipatok sebesar Rp 120 triliun, terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas Rp 78,6 triliun dan PPh Migas Rp 41,4 triliun. APBN 2016 tersebut ditetapkan di atas asumsi harga minyak US\$ 50 per barel sedangkan target produksi atau lifting minyak adalah sebesar 830 ribu barel per hari. Alhasil, apabila harga minyak anjlok hingga US \$ 20 per barel, maka potensi hilangnya penerimaan negara dapat mencapai Rp 42,8 triliun.

Berkurangnya penerimaan negara dari PNBP migas sendiri terhitung bisa mencapai nilai sebesar Rp 34 triliun. Angka ini diperoleh dari nilai PNBP minyak bumi



yang rata-rata menyumbang 73 persen terhadap total PNBP migas. Target PNBP migas ditetapkan Rp 78,6 triliun. Dengan demikian PNBP minyak bumi yang diterima adalah sekitar Rp 57 triliun. Jika harga minyak merosot hingga 60 persen menjadi \$20 per barel, maka dapat menyusutkan PNBP minyak bumi menjadi Rp 23 triliun. Dengan kata lain, pendapatan dari pos ini akan berkurang sekitar Rp 34 triliun. Kondisi ini belum ditambah potensi tergerusnya penerimaan negara yang berasal dari PPh Migas. Pendapatan PPh dari minyak bumi rata-rata menyumbang 35 persen dari total pendapatan PPh migas atau sebesar Rp 14,7 triliun dari target APBN 2016. Anjloknya harga minyak mentah itu, dapat mengikis penerimaan negara hingga Rp 8,8 triliun.



Sumber: Kemenkeu, diolah Bareksa

Gambar 4.5 Komposisi Penerimaan Negara APBN 2016

Artinya, dari kedua analisa tersebut, Pemerintah pada tahun 2016 bisa kehilangan potensi penerimaan negara dengan total senilai Rp 42,8 triliun atau 2 persen dari target penerimaan negara dalam APBN 2016. Hal inilah yang menyebabkan pada tahun anggaran 2016 Pemerintah perlu melakukan kebijakan pengurangan/efisiensi anggaran baik APBN maupun APBD hingga mencapai 3 kali, dan hal ini tentu akan berpengaruh signifikan terkait kinerja pembangunannya.

4.2.3.2 Situasi Pangan Nasional

Situasi pangan di Indonesia pada 2014 tidak lebih baik dibandingkan 2013. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini



disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan Indonesia masuk dalam "jebakan impor pangan". Pembelajaran selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Hanya dalam tempo yang relatif singkat terjadi peningkatan impor serelia yang luar biasa. Impor serelia meningkat 60,45% hanya dalam kurun waktu empat tahun (nilai rata-rata impor serelia periode 2011-2013 dibandingkan dengan periode 2007-2009).

Di tahun 2014 diperkirakan impor beras akan kembali naik di atas 1,5 juta ton, kedelai di atas 1,6 juta ton, dan jagung mendekati 3 juta ton. Impor gandum juga akan meningkat menjadi sekitar 6,5 juta ton, sedangkan impor gula relatif stabil di angka sekitar 3 juta ton. Hal tersebut sebagian disebabkan harga yang cenderung menurun di pasar global yang akan berdampak pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya distorsi impor pangan karena memanfaatkan kecenderungan penurunan harga pangan di pasar global (Kompas, 21 Januari 2014).

Dalam perkembangannya, pada tahun 2016 kinerja industri pangan Indonesia terlihat sudah semakin produktif dan mengalami pertumbuhan. Baru baru ini The Economist Intelligence Unit merilis data ketahanan pangan internasional yang di beri nama Global Food Security Index (GFSI), dari hasil tersebut, tercatat posisi ketahanan pangan Indonesia saat ini berada pada posisi ke 71 dari total 113 negara yang telah di observasi sepanjang tahun 2016 ini. Hasil tersebut terlihat ketahanan pangan nasional mengalami pertumbuhan walaupun masih di peringkat terendah.

Peringkat tersebut bisa di bilang masih rendah, namun jika di bandingkan tahun sebelumnya Indonesia masih berada di peringkat 76-80. Secara keseluruhan, ketahanan pangan nasional mengalami kenaikan poin sekitar 50,6. tahun 2015 lalu hanya 47,9 poin. meningkatnya nilai ketahanan pangan nasional di lihat berdasarkan 3 jangkauan utama seperti, Ketersediaan, Keterjangkauan serta kualitas dan keamanan. Dari segi keterjangkauan, Indonesia mendapatkan nilai 50,3 poin dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat 46,8 poin. Untuk ketersediaan Indonesia mendapat sekitar 54,1 poin dari sebelumnya sekitar 51,2 poin dan kualitas dan keamanan naik tipis ke 42 dari sebelumnya 41,9.



4.2.3.3 Implementasi Undang-undang Desa dalam lingkup Kewenangan Provinsi

Dalam rangka memfasilitasi implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Jawa Timur, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang sangat strategis untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa, meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, menetapkan bantuan keuangan kepada Desa dan melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan di Jawa Timur.

Jumlah Desa di Jawa Timur sebanyak 7.722 Desa, Kelurahan 783 dan Kecamatan 664 merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga memerlukan adanya koordinasi yang baik dan berkelanjutan disemua program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporannya, hal ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan strategi yang efektif dan modern dalam mengkoordinasikannya.

Undang-Undang Desa yang baru disahkan mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat agar mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang besarnya 10 persen dari dana transfer yang diterima Daerah dari Pemerintah Pusat (On Top), dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan dan tingkat kemiskinan. Diperkirakan setiap Desa akan menerima dana berkisar 750 juta rupiah sampai dengan 1,4 Milyar rupiah pertahunnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan kondisi eksisting kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa di Jawa Timur masih belum terbiasa atau mempunyai pengalaman mengelola keuangan negara yang jumlahnya demikian besar, maka perlu adanya langkah-langkah yang strategis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi agar Aparatur Pemerintahan Desa mampu mengelola keuangan dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku melalui kegiatan pemberdayaan baik dalam bentuk Diklat maupun Bimtek.

Disamping itu dalam rangka menciptakan tertib administrasi negara dan dimana Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan yang berhubungan



langsung dengan masyarakat dan kewilayahan berserta permasalahannya, maka perlu mengefektifkan peran Pemerintah Desa dalam pencatatan administrasi kependudukan, kewilayahan, kekayaan/potensi desa dan permasalahannya yang terintegrasi dengan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi serta Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai data dan informasi yang akurat dan terpadu yang dapat memudahkan dalam mengelola potensi dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan cepat dan cermat.

4.2.3.4 Infrastruktur

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur serta dalam rangka mendukung pencapaian target infrastruktur *Middle Income Country* maka, percepatan pembangunan bidang infrastruktur menekankan lima prioritas Utama yaitu:

- a. Percepatan Pembangunan Perumahan
- b. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan
- c. Menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional
- d. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
- e. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
- f. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur.

4.2.3.5 Penerapan SPM

Target pencapaian SPM tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, yang merupakan salah satu bagian dari prioritas pertama dari 11 prioritas nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola. Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola menginginkan terjadinya pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal itu kemudian didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.



Kebijakan terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 32/2004 tentang pemerintah. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kemudian Pasal 11 ayat (3) menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Luasnya cakupan pelayanan dasar, sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Sehingga perlu adanya pengaturan standar pelayanan, paling tidak dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan jasa, pelayanan barang dan/atau pelayanan usaha yang diberikan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SPM merupakan tolok ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah nomer 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Di dalam peraturan tersebut memberikan pemahaman tentang SPM secara memadai dan merupakan hal yang signifikan berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan publik (pelayanan dasar) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Di jajaran birokrasi pemerintah sendiri pengertian SPM masih sering dikacaukan dengan standar persyaratan teknis, standar kerja dan standar pelayanan prima.

Untuk mempercepat penerapan SPM di daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang mengatur penerapan standar pelayanan minimal di daerah melalui 4 tahapan, yaitu: Persiapan



rencana pencapaian SPM, Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan, Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan SPM serta Penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM.

Permasalahan SPM di Jatim:

Penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur, belum semua dituangkan dalam bentuk aturan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah / Instruksi) kebanyakan masih dalam bentuk surat Kepala Daerah tentang pelaksanaan dan pelaporan SPM di Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, memang tidak dinyatakan bahwa penetapan dan pelaksanaan SPM harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Untuk SPM Provinsi secara prinsip telah masuk dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009, tetapi tidak secara eksplisit memuat masing-masing indikator sebagaimana SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah / Kementerian yang bersangkutan. SPM Provinsi secara koordinatif telah dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi yang memuat 9 bidang tetapi dalam perkembangannya 1 (satu) bidang SPM telah ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Rencana Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, sedangkan 8 bidang lainnya masih dalam proses.

4.2.3.6 Gender

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun realita menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih



belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak salah satunya adalah terkait dengan Integrasi Pengarusutamaan Gender.

Integrasi Pengarusutamaan Gender kedalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di Tingkat Pusat maupun Daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki maupun anak perempuan. Terkait dengan hal tersebut, Isu strategis gender yang perlu memperoleh perhatian adalah :

1. Pelaksanaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender belum optimal;
2. Masih banyaknya SKPD yang belum membentuk focal point;
3. Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD;
4. Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

Isu Strategis Gender ini nantinya akan berdampak pada peningkatan kapasitas SDM penggerak PPRG di daerah. Dengan meningkatnya kapasitas SDM penggerak PPRG daerah diharapkan dapat mengawal pelaksanaan PPRG di masing-masing SKPD sehingga program dan kegiatan yang dilakukan SKPD benar-benar dapat mengintegrasikan isu kesenjangan gender sehingga dapat menjawab permasalahan pembangunan dimasing-masing sektor.

4.2.3.7 Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industry, polusi udara, limbah



B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

RAN GRK merupakan komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2020.

4.2.3.8 Energi

Isu energi dan sumber daya mineral nasional adalah ketahanan energy, diversifikasi energy, konservasi energy, dukungan terhadap MP3EI, subsidi energy, energy untuk daerah perbatasan dan tertinggal, pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral, dan isu terkait lingkungan hidup. Adapun rasio elektrifikasi nasional tahun 2012 adalah sebesar 76,56%, yang berarti bahwa masih terdapat sekitar 23,44% belum terpenuhi.

Jika dilihat rasio elektrifikasi di ASEAN, Indonesia relatif tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan Indonesia, lebih tinggi dibanding dengan Filipina. Jika estimasi satu keluarga terdiri dari empat orang, maka ± 28 juta penduduk Indonesia belum bisa menikmati listrik, karena hingga pertengahan 2016 rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 89,5%.

4.2.4 Isu Wilayah Perbatasan

4.2.4.1 Sinergitas Kebijakan antar Wilayah

Perbedaan karakteristik dan potensi wilayah diantara dua wilayah yang saling berbataasan, hingga saat ini masih berpotensi memicu gejolak antar masyarakat. Di sisi lain perbedaan dalam aturan dan penerapannya juga memungkinkan munculnya permasalahan yang memungkinkan terjadinya gejolak antar wilayah. Isu strategis dari permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar Provinsi (Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, maupun Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali) maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara lain :



- **Disharmoni aturan**, kebijakan serta penerapannya;

Fenomena ini muncul seperti adanya perbedaan penerapan aturan pada sektor Pendidikan (misalnya perbedaan aturan Sekolah di dua wilayah perbatasan), Kesehatan (misalnya dalam kebersamaan Pemberantasan Wabah Penyakit), Sosial (misalnya dalam kebersamaan penanganan PMKS), Perikanan & Kelautan (misalnya kesamaan dalam penerapan aturan pemakaian Jaring di Laut)

- **Kesenjangan Sosial/ekonomi**;

Kesenjangan karakteristik Sosial Ekonomi masyarakat seperti pada dua wilayah yang berbeda akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah.

- **Disorientasi Prioritas Pembangunan**;

Perbedaan orirntasi pembangunan yang akan diprioritaskan berpotensi memunculkan masalah di wilayah perbatasan seperti perbedaaan waktu penanganan Infrastruktur jalan yang saling berhubungan pada dua wilayah yang saling berbatasan.

- **Eksplotasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain di luar wilayah administrasinya sendiri. Fenomena pemakaian Air Bersih dari Provinsi lain dengan perlunya juga mempertimbangkan konservasi hutan serta daya dukung lingkungan.

4.2.4.2 Penetapan Batas Wilayah

Perihal batas wilayah antar-daerah sudah ditegaskan dalam Undang-undang tentang Pembentukan Suatu Daerah. Namun, substansi yang tercantum dalam peraturan perundangan dimaksud terkait batas ternyata hanya secara umum. Karena batas pastinya dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan kemudian. Dikaitkan dengan otonomi daerah, hal ini menjadi sumber sengketa bagi daerah.

Di dalam Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi baik provinsi maupun kabupaten/kota belum didukung dengan batas daerah secara pasti di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat. Hal inilah yang sering menimbulkan



konflik batas antar-daerah. Apalagi, jika daerah perbatasan yang diperebutkan mengandung sumber daya alam.

Gejala konflik yang dikhawatirkan sudah mulai terjadi di Jawa Timur. Kasus-kasus perbatasan seperti Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar, Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, serta masih terindikasi dari beberapa daerah lainnya merupakan isu strategis yang layak untuk dicarikan solusinya.

4.2.5 Isu berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Penataan Ruang, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.2.5.1 Isu Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Penyusunan substansi dasar pembangunan jangka menengah daerah tentunya tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Sejuahmana hasil-hasil pembangunan jangka menengah 5 tahun sebelumnya mampu memberikan kontribusi yang positif dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memacu serta mendorong peningkatan, pengembangan dan percepatan pembangunan daerah 5 tahun kedepan dengan tetap melihat isu permasalahan/strategis yang berkembang.

Dari hasil evaluasi periodisasi RPJPD melalui tahapan pelaksanaan jangka menengah 5 tahunan, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan dua tahap sebelumnya, pembangunan pada tahap I diarahkan untuk menata dan membangun Jawa Timur dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan umum pembangunan daerah ini memberikan makna bahwa jangka waktu 5 tahun pembangunan daerah lebih difokuskan pada peningkatan dan pengembangan agribisnis yang dimulai dari langkah persiapan yaitu (1) menyiapkan regulasi untuk penguatan sistem agribisnis, (2) membangun kelembagaan pasar agribisnis, (3) menyiapkan SDM petani penyuplai produk, (4) membangun jaringan distribusi dan pasar, (5) meningkatkan kualitas produksi, dan lain-lain.



Langkah-langkah awal sebagai upaya membangun dan mengembangkan system agribisnis di Jawa Timur telah direalisasikan selama 5 tahun berjalan yaitu dengan membangun Pasar Induk Agribisnis (PIA) di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Dengan terbentuknya sistem agribisnis diharapkan Jawa Timur memiliki pondasi kuat untuk menyiapkan langkah tindak lanjut pengembangan agribisnis melalui kebijakan, rencana dan program 5 tahun berikutnya.

RPJMD Tahap II (2009-2014)

Pembangunan daerah tahap kedua diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan produktivitas dan distribusi produk, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian.

Pada tahapan 5 tahun kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan peningkatan produktivitas dan distribusi produk seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya petani agribisnis dengan didukung teknologi sehingga memperkuat daya saing perekonomian khususnya dalam rangka menghadapi persaingan pasar perdagangan bebas di Asia Tenggara.

Fokus arah kebijakan ini tercermin dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan dan meningkatkan fungsi Balai Latihan Kerja di daerah-daerah, maupun melalui bimbingan teknis kepada para kelompok petani di perdesaan khususnya yang memiliki potensi pengembangan agribisnis yang berdaya saing tinggi.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah telah dilakukan dengan memberikan matrikulasi pelatihan/bimbingan yang berupa pemanfaatan teknologi tepat guna serta manajemen bisnis seperti teknik dan strategi petani dalam menghadapi dan mengantisipasi persaingan kuat produksi dan pasar agribisnis yang harus dihadapi. Disisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan insentif-insentif maupun fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang diperlukan agar para petani semakin mantap dalam meningkatkan produk agribisnis yang berbasis teknologi.



Arah kebijakan ini nampak dengan dukungan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada para petani agribisnis baik berupa bantuan dalam berbagai jenis peralatan teknologi pertanian maupun pupuk yang tercermin dari alokasi dana yang ada pada institusi terkait, sehingga diharapkan peningkatan sumber daya manusia yang didukung dengan teknologi berjalan secara simultan.

Sebagai wujud pelaksanaan arah kebijakan tahapan kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan berbagai event pameran di beberapa daerah di Jawa Timur maupun tingkat Nasional termasuk mengikuti agenda kegiatan pameran di luar negeri yang dilakukan melalui kerjasama antar Negara. Perwujudan pelaksanaan dapat ditinjau pula dari transaksi ekspor produk agribisnis Jawa Timur menuju negara-negara lain.

RPJMD Tahap III (2014-2019)

Dengan mempertimbangkan hasil yang sudah dicapai pada tahapan tahun I dan II, pada tahapan tahun ketiga (2014-2019) mendatang Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta didukung dengan kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Kebijakan ini mendeskripsikan bahwa untuk lebih memantapkan kapasitas kelembagaan yang sudah dibangun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam jangka 5 tahun mendatang perlu memperhatikan kapasitas sumber produksi agribisnis dan jaringan arus distribusi pasar.

Dengan memberdayakan kemampuan dan teknologi petani yang sudah dimiliki diharapkan petani agribisnis mampu berinovasi dalam mengolah dan mengembangkan sumber daya alam menjadi bahan produk jadi yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi, sehingga semua subyek pelaku ekonomi agribisnis dapat membawa (ekspor) ke pasar transaksi agribisnis di dalam negeri khususnya pasar persaingan produk agribisnis dari Negara-negara di Asia Tenggara.

Upaya ini perlu dilakukan dengan harapan pada tahapan tahun keempat mendatang memasuki era perdagangan bebas (AFTA) di Asia Tenggara tahun 2015



yang akan datang, produk agribisnis Jawa Timur benar-benar siap, memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing dengan produk Negara Asia Tenggara.

4.2.6 Isu Penataan Ruang

4.2.6.1 Isu Perencanaan Tata Ruang

- **Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah**

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mempertahankan luasan sawah irigasi dan non irigasi berupa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak terjadi alih fungsi pada lahan pertanian.

- **Belum optimalnya peran kawasan strategis provinsi**

Pemantapan peran dan fungsi Kawasan Strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah untuk mendorong pengembangan kawasan dalam rangka pemerataan wilayah. Untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru dan pemerataan wilayah diperlukan pengembangan kawasan-kawasan diantaranya:

- a. Cluster Agropolitan Madura yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
- b. Cluster Agropolitan Ijen yang terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Cluster Agropolitan Bromo Tengger Semeru yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.
- d. Cluster Agropolitan Wilis yang terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan.
- e. Cluster Metropolitan yang terdiri dari Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.
- f. Cluster Segitiga Emas yang terdiri dari Kawasan Strategis Segitiga Emas Pertumbuhan Tuban, Lamongan dan Bojonegoro; Kawasan Strategis Agroindustri Gresik dan Lamongan; dan kawasan perbatasan antar-kabupaten/kota yang memiliki potensi pertumbuhan perekonomian sektoral



yang tinggi pada Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro.

- g. Cluster Regional Kelud berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.
- h. Cluster Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Cluster pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan sepanjang pesisir Jawa Timur dan Pulau-Pulau Kecil.

- **Potensi bencana di Jawa Timur yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah**

Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari adanya potensi kebencanaan yang dapat memberikan ancaman terhadap wilayah yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan dan investasi, sehingga perlu upaya mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang.

4.2.6.2 Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- **Dinamika pembangunan yang memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan perkotaan**

Dinamika pembangunan pada kawasan perkotaan yang memberikan pengaruh terhadap alih fungsi lahan perkotaan sehingga diperlukan suatu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam kawasan perkotaan

- **Keterbatasan infrastruktur wilayah**

Pemerataan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan perkotaan dan antar kawasan, peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Jawa Timur

- **Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan**



Diperlukan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan dimana pembangunan kawasan perkotaan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sector lainnya.

- **Belum diacunya RTRW dalam Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dinamika alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

4.2.6.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Strategis KLHS terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air, permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, permasalahan efek gas rumah kaca, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan Jawa Timur, masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan deforestasi kawasan hutan Jawa Timur, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air, terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan PETI, efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian,



meningkatnya intensitas usaha tani di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan iklim pergeseran kondisi alam dan terjadinya berbagai bencana alam untuk menemukan keseimbangan baru, peningkatan kesadaran masyarakat akan kaitan aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, adanya overcapacity sebagian besar prasarana dan sarana perhubungan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tata niaga ekspor impor khususnya ekspor, negara tujuan memberlakukan green industri, green economy dan eco-labelling, daya saing efisiensi penggunaan bahan baku utama dan penolong serta penggunaan energi melalui konsep produksi bersih meningkatkan daya saing industri dalam negeri, fasilitasi dan pendampingan untuk menuju tercapainya green industry dan green productivity (ramah lingkungan) bagi industri.

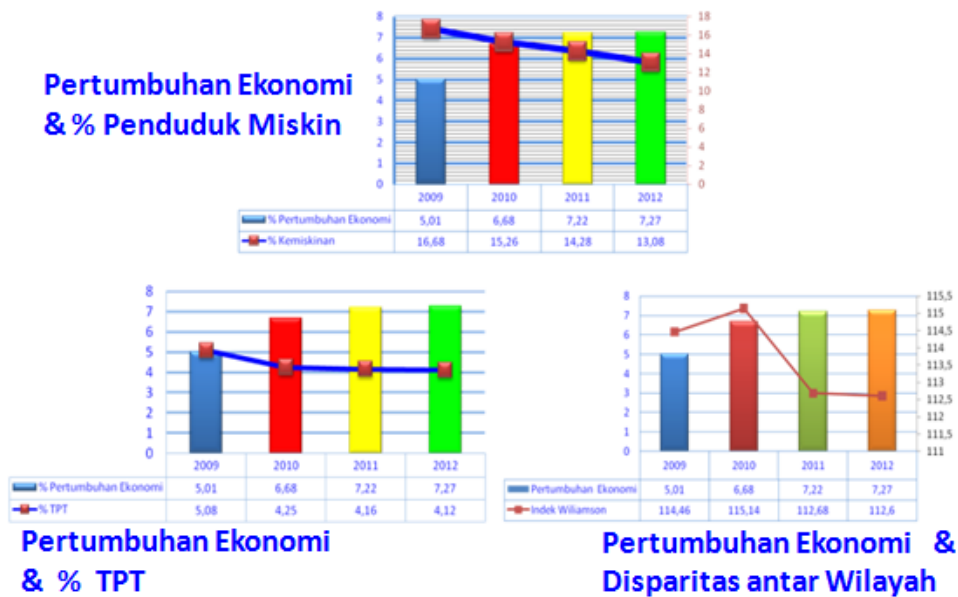
4.2.7 Isu Strategis Jawa Timur

4.2.7.1 Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

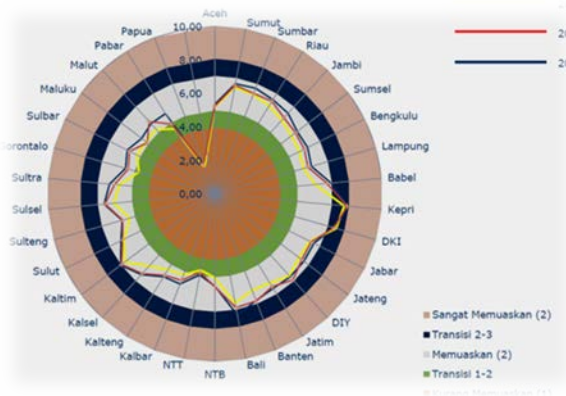
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009 - 2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan" seperti pada Gambar 4.6.

Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).





Kualitas Inklusif dari Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 4.6 Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

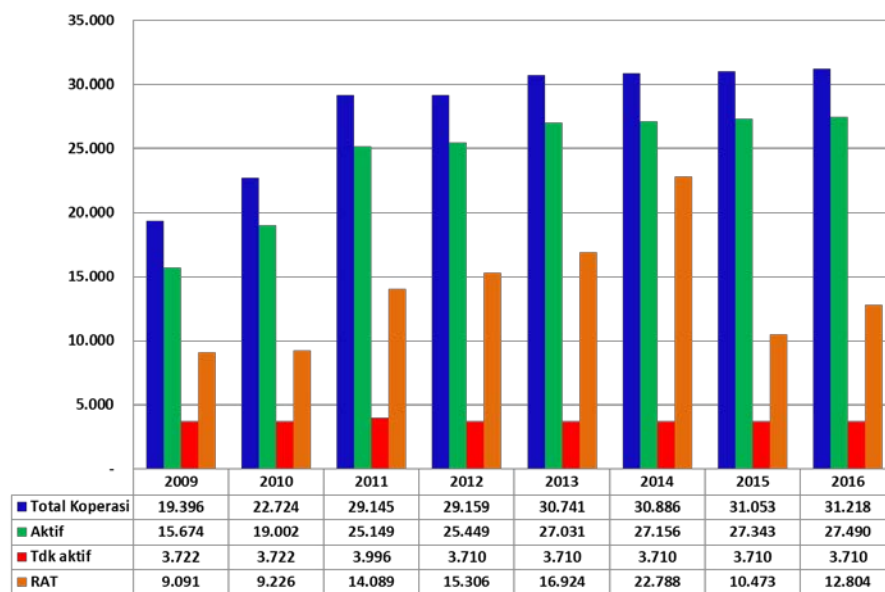
4.2.7.2 Peningkatan kemampuan dan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39% (2012). Disisi lain perkembangan Koperasi di Jawa Timur tahun 2012 juga menunjukkan



peningkatan dibandingkan tahun 2009, total koperasi menjadi 29.159 unit atau meningkat 50,54% jika dibandingkan dengan 2009 sebesar 19.369 unit.

Dalam perkembangannya meski dari tahun 2012-2013 masih mengalami kenaikan, namun sejak tahun 2013-2016 trennya cenderung stagnan, seperti tercantum pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Keragaan Koperasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM dalam 5 tahun kedepan adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

4.2.7.3 Disparitas Wilayah

Adanya disparitas wilayah yang Antara lain dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo),

Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

4.2.7.4 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar dalam pengembangan sistem struktur ruang yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Isu strategis terkait infrastruktur terdiri dari:

1. Peningkatan konektivitas dan penyediaan jaringan transportasi
2. Pengembangan keterpaduan antarmoda dan pengembangan transportasi multimoda
3. Penurunan biaya transportasi dan biaya logistik
4. Pengelolaan jaringan irigasi dalam mendukung kedaulatan pangan
5. Penanganan Bencana banjir dan kekeringan
6. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional.
7. Pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif infrastruktur (non APBD)

4.2.7.5 Pengangguran dan Kondisi Ketenagakerjaan

Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur hingga tahun 2016 masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang ditandai dengan masih banyaknya angkatan kerja belum terserap. Menurut data BPS terdapat kenaikan TPT dari tahun 2014 sampai tahun 2016 pada bulan Agustus yaitu 4,19 di tahun 2014 menjadi 4,21 di tahun 2016. Di samping itu terdapat beberapa isu strategis lain yang berhasil diidentifikasi terkait ketenagakerjaan diantaranya adalah upah pekerja yang relatif masih rendah dan masih rendahnya jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, kecilnya perusahaan yang menjadi peserta program jamsostek aktif (pada tahun 2015 ada 48 persen, meningkat menjadi 50 persen di tahun 2016), kemudian perusahaan yang memenuhi persyaratan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) juga masih kecil (ada 27 persen di tahun 2015 dan 35 persen di tahun 2016) serta skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim/belum sesuai kualifikasi.



Isu selanjutnya yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan termasuk dalam hal pengendalian TKA/tenaga kerja asing, serta perluasan dan penempatan tenaga kerja seperti ketersediaan informasi pasar kerja maupun “linkage program” antara perusahaan dan pencari kerja.

Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan dari sektor pertanian juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Terdapat sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur, pemerintah provinsi butuh strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi serta menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya juga dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mempromosikan usaha non-tani seperti industri pedesaan skala kecil.

4.2.7.6 Energi

Ratio ketersediaan listrik Jawa Timur sebesar 70,53 persen. Selebihnya sebesar 29 persen adalah ketersediaan listrik yang sudah dan dalam proses diusahakan sendiri (captive power) untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup, maka kebutuhan energy juga akan meningkat.

Kontribusi pertambangan sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa Timur. Eksploitasi sumber daya mineral tersebut belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tanpa ijin atau belum sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sampai dengan Tahun 2012, pertambangan tanpa ijin di Jawa Timur seluas 1.438,08 hektar tersebar di 20 Kabupaten, dengan upaya penertiban per tahun berkisar 213,23 hektar.



4.2.7.7 Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sector utama yaitu kehutanan, pertanian, energy, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah. Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO₂. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO₂ eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO₂ eq.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari berbagai sumber, Tahun 2012). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestic dan limbah industry. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu



Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

4.2.7.8 IPM

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada komponen angka harapan hidup, ini masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Dari data BPS dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk yang menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septik tank. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.

Tabel 4.3 Capaian IPM di Jawa Timur

| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Tahun | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Jawa Timur | 66,06 | 66,74 | 67,55 | 68,14 | 68,95 | 69,74 |
| Nasional | 67,09 | 67,70 | 68,31 | 68,90 | 69,55 | 70,18 |

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Kenaikan IPM diatas dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dipotret dalam angka IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Sebagai contoh usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajar dikdas 9 tahun (pendidikan dasar), maka hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian



4.2.7.9 Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017.549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48 juta ton. Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan; sebanyak 4,98 juta rumah tangga pada tahun 2013
2. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
4. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;
5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan system agribisnis;
6. Ketahanan Pangan;
 - a. Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi
 - b. Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian



4.2.7.10 Kemiskinan

Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-program mengentas kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara, yaitu (i) mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya, (ii) meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (BRS 2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08%, kemudian menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013.

Berdasarkan data BPS (BRS 3 Januari 2017), pada tahun 2015 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.775.970 jiwa atau 12,28%, kemudian menurun menjadi 4.638.530 jiwa atau 11.85% pada September tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 0,20 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2015 mencapai 11,13% dan menjadi 10,70% pada tahun 2016. Jadi secara umum tingkat kemiskinan Jawa Timur menunjukkan tren yang cenderung menurun.

Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783 rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita



per bulan. Sedangkan Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 4,02% yakni dari 316.464 rupiah per kapita per bulan pada September 2015 menjadi 329.172 rupiah per kapita per bulan pada September 2016. Serta dalam kurun lima tahun terakhir (Year on Year) Garis Kemiskinan Jawa Timur terus mengalami kenaikan.

Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013. Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

Indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2015 menunjukkan penurunan dari 1,99 pada bulan Maret 2016 menjadi 1,95 pada September 2016, sedangkan indeks keparahan mengalami penurunan dari 0,474 pada bulan Maret 2016 menjadi 0,473 pada bulan September 2016. Penurunan kedua indeks ini pada rentang tahun 2015-2016 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, begitupula dengan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin kecil.

4.2.7.11 Kerjasama Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, hal ini meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal. Disamping itu dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga



tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

4.2.7.12 Komunikasi dan Informatika

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup tata kelola TIK, data center, infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channe*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.



Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

4.2.7.13 Penanggulangan Bencana

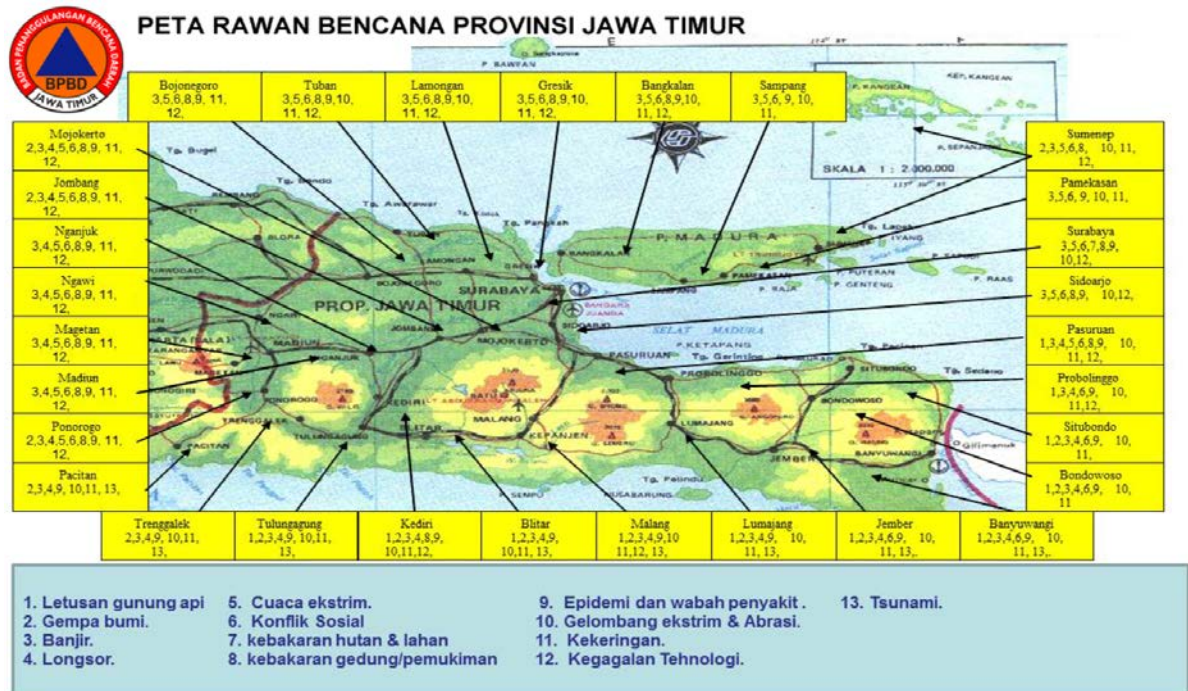
Provinsi Jawa Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan wilayah yang rawan bencana; baik yang berupa bencana alam maupun bencana sosial. Di dalam Perda5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Timur dikelompokkan ke dalam: kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang. Dokumen yang sama juga mengklasifikasikan beberapa area sebagai kawasan rawan bencana alam geologi sebagai bagian dari kawasan lindung geologi.

Jika menilik tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; hasil identifikasi menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur telah dan berpotensi terkena 13 jenis bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial), yaitu: banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, longsor, cuaca ekstrem (angin puting beliung) gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung dan permukiman, konflik sosial/kerusuhan, epidemi dan wabah penyakit dan kegagalan teknologi.

Adapun beberapa Isu Strategis pada terkait kebencanaan di Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Penanganan di masalah bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu, banjir bandang, gunung api, tsunami dan gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;

3. Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi kebencanaan dalam upaya penanggulangan bencana;
4. Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana;
5. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;



Gambar 4.8 Peta Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur

4.3 Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2014-2019

Isu strategis pembangunan Jawa Timur pada periode 2014-2019 dirumuskan dari (1) permasalahan-permasalahan pembangunan per urusan dalam pemerintahan Jawa Timur periode sebelumnya (2009-2014); dan (2) isu-isu strategis internasional, regional (Asia), nasional, maupun kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan Jawa Timur yang menjadi acuan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Berdasarkan informs yang dijelaskan pada sub-sub bab sebelumnya, maka isu strategis pembangunan Jawa Timur pada periode 2014-2019 dapat dirangkum sebagai berikut:



1. Isu strategis yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Sejumlah permasalahan/isu strategis yang dimaksud antara lain:
 1. Disparitas wilayah di Jawa Timur yang masih relative tinggi
 2. Permasalahan pengangguran, kondisi ketenagakerjaan serta hubungan industrial yang rentan (terbatsnya perlindungan tenaga kerja)
 3. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi tingkat pendidikan, derajat kesehatan maupun daya belinya. Masyarakat rentan terhadap instabilitas harga komoditas serta ketergantungan tinggi terhadap subsidi pemerintah.
 4. Disparitas gender yang masih jelas terlihat
 5. Relatif tingginya angka kemiskinan
 6. Kejadian bencana alam yang tidak terduga yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat
2. Isu strategis terkait upaya peningkatan perekonomian wilayah berbasis potensi ekonomi lokal Jawa Timur (agrobisnis, agroindustry dan industrialisasi) sehingga diharapkan dapat bersaing dalam perekonomian global, namun tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat banyak, khususnya "*wong cilik*". Beberapa isu strategis yang dimaksud antara lain:
 1. Isu pertumbuhan ekonomi yang inklusif
 2. Isu ketahanan pangan dan ancaman global terhadap krisis pangan
 3. Keterbatasan infrastruktur dan pemerataannya
 4. Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan Jawa Timur
 5. Gejolak perekonomian global dan globalisasi ekonomi Asia dan dunia
3. Isu srategis terkait upaya penciptaan pembangunan berkelanjutan, di mana ada keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Beberapa isu strategis yang dimaksud adalah:
 1. Berbagai permasalahan lingkungan hidup
 2. Kecukupan dan keberlanjutan daya dukung air, energi maupun sumberdaya alam lainnya
 3. Isu perencanaan dan pemanfaatan tata ruang



4. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana-parasarana transportasi
4. Isu strategis terkait tata kelola pemerintahan daerah, antara lain:
 1. Implementasi Undang-Undang Desa
 2. Perubahan kewenangan pemerintah pusat-propinsi-kabupaten/kota
 3. Isu kerjasama daerah
 4. Keterbatasan kualitas pelayanan publik, termasuk terbatasnya pemanfaatn teknologi dan informasi dalam pelayanan public yang dapat menjamin tata kelola yang baik
 5. Keterbatasan kualtas sumberdaya aparatur negara
5. Isu strategis terkait kehidupan beragama dan bermasyarakat serta berpolitik masyarakat Jawa Timur, meliputi:
 1. Isu konflik berbasis agama ataupun konflik sosial lainnya, khususnya saat menjalankan demokrasi
 2. Isu konflik terkait wilayah perbatasan





DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| BAB 4 ISU-ISU STRATEGIS..... | 235 |
| 4.1 Permasalahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur | 235 |
| 4.2 Isu – Isu Strategis | 244 |
| 4.2.1 Isu Internasional..... | 244 |
| 4.2.1.1 Gejolak Perekonomian Global | 244 |
| 4.2.1.2 Lingkungan Hidup | 247 |
| 4.2.1.3 Millenium Development Goals (MDG's) | 247 |
| 4.2.1.4 Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan..... | 248 |
| 4.2.1.5 Energi..... | 249 |
| 4.2.1.6 Air | 249 |
| 4.2.1.7 Transportasi..... | 251 |
| 4.2.2 Isu Regional | 251 |
| 4.2.2.1 Daya Saing Nasional dalam AEC | 251 |
| 4.2.2.2 Transportasi..... | 253 |
| 4.2.3 Isu Nasional | 254 |
| 4.2.3.1 Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditi | 254 |
| 4.2.3.2 Situasi Pangan Nasional | 256 |
| 4.2.3.3 Implementasi Undang-undang Desa dalam lingkup Kewenangan Provinsi..... | 258 |
| 4.2.3.4 Infrastruktur | 259 |
| 4.2.3.5 Penerapan SPM | 259 |
| 4.2.3.6 Gender | 261 |
| 4.2.3.7 Lingkungan Hidup | 262 |
| 4.2.3.8 Energi..... | 263 |
| 4.2.4 Isu Wilayah Perbatasan..... | 263 |
| 4.2.4.1 Sinergitas Kebijakan antar Wilayah | 263 |
| 4.2.4.2 Penetapan Batas Wilayah..... | 264 |



| | |
|--|------------|
| 4.2.5 Isu berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Penataan Ruang, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 265 |
| 4.2.5.1 Isu Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah..... | 265 |
| 4.2.6 Isu Penataan Ruang..... | 268 |
| 4.2.6.1 Isu Perencanaan Tata Ruang | 268 |
| 4.2.6.2 Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang..... | 269 |
| 4.2.6.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 270 |
| 4.2.7 Isu Strategis Jawa Timur..... | 271 |
| 4.2.7.1 Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.. | 271 |
| 4.2.7.2 Peningkatan kemampuan dan Daya Saing Koperasi dan UMKM | 272 |
| 4.2.7.3 Disparitas Wilayah..... | 273 |
| 4.2.7.4 Infrastruktur | 274 |
| 4.2.7.5 Pengangguran dan Kondisi Ketenagakerjaan.. | 274 |
| 4.2.7.6 Energi..... | 275 |
| 4.2.7.7 Lingkungan Hidup | 276 |
| 4.2.7.8 IPM | 277 |
| 4.2.7.9 Ketahanan Pangan dan Pertanian..... | 278 |
| 4.2.7.10 Kemiskinan | 279 |
| 4.2.7.11 Kerjasama Daerah..... | 280 |
| 4.2.7.12 Komunikasi dan Informatika..... | 281 |
| 4.2.7.13 Penanggulangan Bencana | 282 |
| 4.3 Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2014-2019..... | 283 |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 4.1 Hasil Inventarisasi Permasalahan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Urusan..... | 235 |
| Tabel 4.2 Lingkup AEC 2015 | 252 |
| Tabel 4.3 Capaian IPM di Jawa Timur | 277 |





DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|-----|
| Gambar 4.1 | Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Atas dasar Harga Konstan 2000 Menurut Pengeluaran, Tahun 2005-2012 (YoY, dan dalam %) | 245 |
| Gambar 4.2 | Trend Perlambatan Investasi tahun 2010 - Tw. III 2013 | 246 |
| Gambar 4.3 | Tingkat Subsidi Energi Tahun 2009-2014 | 254 |
| Gambar 4.4 | Subsidi Energi dan Rata – Rata Harga Minyak ICP | 255 |
| Gambar 4.5 | Komposisi Penerimaan Negara APBN 2016 | 256 |
| Gambar 4.6 | Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur | 272 |
| Gambar 4.7 | Keragaan Koperasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur | 273 |
| Gambar 4.8 | Peta Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur | 283 |

